

**PUBLIC SUMMARY**  
**(Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)**

**AUDIT PENILIKAN IV**

**Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  
(IUIPHHK) - Hutan Alam**

**PT. DIADYANI TIMBER**

**SK Menteri Kehutanan No. SK.292/Menhut-II/2009 tanggal 18 Mei 2009  
Luas ± 205.160 ha**

**Kabupaten Mimika  
Provinsi Papua**

**Oleh**

**LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA**



**TÜVRheinland®**  
**Precisely Right.**

## IDENTITAS LPPHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	<b>PT. TUV Rheinland Indonesia</b>
2.	Alamat	Menara Karya Lantai 10, Jl. HR. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Telp : 021- 579 44 579 Fax : 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com
3.	Akte Pendirian dan perubahannya	Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.  Akta No. 22 tanggal 15 Juli 2021 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn. Akta Perubahan telah disampaikan kepada Kementrian Hukum dan HAM sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-041999 Tanggal 16 Juli 2021.
4.	Pengurus Lembaga Penilai PHPL	<u>Komisaris Utama:</u> Jennelie Suzanne Petit  <u>Komisaris:</u> DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer  <u>Direktur Utama :</u> I Nyoman Susila  <u>Direktur :</u> Edmundus Wiharyono  <u>General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5.	Tim auditor penilikan PHPL	1. Jubaedi Nu'man (Auditor Prasyarat) 2. Heni Handayani (Auditor Produksi dan VLK) 3. Ibrohim Prayetno (Auditor Ekologi) 4. M. Jamaludin Al Afghoni SP (Auditor Sosial) 5. Sjahrul Wira Kusuma (Auditor VLK)

## Identitas Perusahaan **PT INTRACAWOOD MANUFACTURING**

1.	Nama Unit Manajemen	: <b>PT. Diadyani Timber</b>
2.	Alamat	: <u>Kantor Pusat Jakarta:</u> Jl. S.Parman Kav-67, Jakarta Barat Nama Kontak : Ir. Neneng Telephone : (021) 5306448 Fax : (021) 5306458 Email : <a href="mailto:prckli@kli-group.com">prckli@kli-group.com</a> <a href="mailto:prckli@yahoo.com">prckli@yahoo.com</a>  <u>Kantor Cabang:</u> Jl. KS. Tubun No. 52A, Resimen Hamadi, Jayapura, Provinsi Papua
3.	Lokasi Unit Manajemen	: Lokasi Unit Manajemen : Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
4.	Luas Areal Hutan yang Disertifikasi	: ± 205.160Ha
5.	SK IUPHHK -HA	: SK. Menteri Kehutanan No. SK.292/Menhut-II/2009 Tanggal 18 Mei 2009
6.	Susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan	: Berdasarkan akta perubahan terakhir Akta Nomer 36 tanggal 18-08-2016, Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut: Direktur : Bonari : Puji Suwahyono
7.	Pemilik Perusahaan/Saham	: Susunan Kepemilikan Saham PT. Diadyani Timber sesuai dengan Akte Notaris Jose Dima Satria No.36 tanggal 18 -08-2016 adalah PT Abadi Sinar Pelangi dan Hunawan Widjajanto
8.	Penanggung Jawab Sertifikasi	: Ir. Neneng SM Teguh

## RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	28 Januari 2022 (secara jarak jauh) - Dinas Kehutanan Provinsi Papua. - BPHP Wilayah XV Jayapura	Koordinasi Entry meeting dilaksanakan secara remote. Instansi Dinas Kehutanan BPHP Wilayah XV Jayapura.
Pertemuan Pembukaan	27 Januari 2022	Pertemuan pembukaan (opening meeting) dilaksanakan secara remote yang dihadiri oleh MR dan kepala-kepala bagian di PT Diadyani Timber
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara <i>remote audit</i> )	27 s/d 31 Januari 2022	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilaksanakan secara remote sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Lampiran 1.2. dan Lampiran 2.2 untuk VLK.
Exit Meeting dengan dengan Instansi Kehutanan	31 Januari 2022 - Dinas Kehutanan Provinsi Papua. - BPHP Wilayah XV Jayapura	Koordinasi Exit meeting dilaksanakan secara remote. Instansi Dinas Kehutanan, BPHP Wilayah XV Jayapura.
Pertemuan Penutupan	31 Januari 2022	Pertemuan penutupan (closing meeting) dilaksanakan secara remote yang dihadiri oleh MR dan kepala-kepala bagian di PT Diadyani Timber.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.1 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.

### **RINGKASAN HASIL PENILAIAN**

<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
PRASYARAT	1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT / RE / HT / Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT,BATB)	Baik	PT Diadyani Timber memiliki dokumen legal (NIB, NPWP, SIUP, TDP, SK IUPHHK-HTI) dan dokumen administrasi tata batas yang tersedia lengkap sesuai dengan realisasi tata batas yang telah dilakukan
		1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Diadyani Timber pada saat penilikan III sama dengan saat penilikan II yaitu belum temu gelang. Secara keseluruhan panjang batas areal IUPHHK-HA PT Diadyani Timber adalah sepanjang 240,51 km. Sedangkan realisasi penataan batas sepanjang 230,22 km (95,72%)
		1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	Sedang	Terdapat pengakuan dari masyarakat berupa yang ditunjukkan dengan Berita Acara Penataan Batas dengan pemegang ulayat. Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus
		1.1.4. Tindakan Perubahan Izin dalam Hal terhadap perubahan fungsi Kawasan (apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan Atau Perubahan perencanaan telah diusulkan oleh pemegang izin dan telah dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan, tetapi masih dalam proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang
		1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sector kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Sedang	Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin tetapi tidak seluruhnya.
		1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan >80 %.
	1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL serta Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara)
		1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL .
	1.3. Jml & Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkat Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan	1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Buruk	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupanbidang Ganis PHPL <50 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
		1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan antara 50-70% dari rencana sesuai kebutuhan.
		1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Diadyani Timber telah memiliki Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap
	1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)	1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	IUPHHK – HA			
		1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Diadyani Timber memiliki Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia.
		1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Tersedia tenaga pelaksana untuk sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan
		1.4.4. Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
		1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai
		1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan (minimal 50%)
		1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%).
PRODUKSI	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Diadyani Timber telah memiliki dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi/risalah/landscaping areal

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
		2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Baik	Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) PT Diadyani Timber baru sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK/RPKH.
		2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	Sedang	Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT PT Diadyani Timber seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
	2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Sedang	PT Diadyani Timber memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, dan peta pohon), namun belum menunjukkan peta kelas hutan.
		2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Diadyani Timber memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK . namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
	2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur	Sedang	PT Diadyani Timber memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis akan tetapi implementasinya baru sebagian (minimal 60%).
		2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur	Baik	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan di areal konsesi PT Diadyani Timber tahun 2019-2021 yang tidak ditebang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( $\geq 25$ batang/Ha).
		2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Baik	Terdapat pohon induk jenis komersial di areal konsesi PT Diadyani Timber yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 ( $\geq 100$ batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
		2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	PT Diadyani Timber telah memiliki rencana penerapan Silin yang tertuang di dalam RKUPHHK, namun realisasinya belum sesuai dengan rencana yang telah tercantum tersebut.
		3.3.5. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam Setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Sedang	PT Diadyani Timber telah menunjukkan upaya untuk melaksanakan kegiatan penanaman SILIN walaupun belum sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA dan dokumen RKT 2020-2021.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil huan kayu	2.4.1. Ketersediaan prosedur pemafaatan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Diadyani Timber telah memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan tetapi isinya belum sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
		2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Diadyani Timber telah mengimplementasikan prosedur penebangan ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan
		2.4.3.	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata dari kegiatan pemanenan

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Limbah pemanfaatan hutan minimal		PT Diadyani Timber untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) $\leq 15\%$ dengan luas keterbukaan wilayah sebesar $0,03 + 0,03 + 0,012 + 0,01 + 0,01$ , yaitu seluas $0,205$ sehingga persentase kerusakan tegakan sebesar $0,082/1 \times 100 = 8,21\%$ .
		2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Pemanfaatan kayu PT Diadyani Timber berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan lebih besar dari $0,7\%$ .
	2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penangan/pemanfaatan pada areal kerjanya	2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval, atau spesifik Pemegang Hak Pengelolaan)	Baik	PT Diadyani Timber telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.
		2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Sedang	PT Diadyani Timber memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi dalam periode 5 tahun terakhir belum sesuai seluruhnya dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
		2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	Sedang	PT Diadyani Timber telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal $50\%$ ) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun penandaan kawasan lindung belum seluruh dilakukan sesuai dengan adanya perubahan.

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis masih < 50% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Kekurangan pencapaian target RKT 2021 dijadikan carry over RKT 2022 dengan harapan kinerja pemanenan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya setelah segala kendala di tahun 2021 dapat teratasi.
	2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	Sedang	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian atau Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir wajar dengan pengecualian terkait dengan imbalan kerja dan parameter : Likuiditas 100-150%, Solvabilitas < 100%, Rentabilitas : positif (tahun 2017 – 2019) dan negatif (tahun 2020).
		2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi dana yang telah disediakan oleh perusahaan untuk kegiatan kelola hutan hanya terpakai sekitar 60-79% kebutuhan kelola hutan berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit oleh akuntan publik).
		2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional.	Buruk	Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT Diadyani Timber belum proporsional (perbedaan lebih dari > 50%).
		2.6.4.	Baik	Realisasi pendanaan yang

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Realisasi Pendanaan Yg Lancar		disediakan oleh PT Diadyani Timber untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu
		2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal PT Diadyani Timber sekitar 60% - 80%.
		2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman /pembinaan hutan.	Buruk	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan oleh PT Diadyani Timber (secara luas dan kualitas tegakan) < 60% dari yang direncanakan.
EKOLOGI	3.1. Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL, RKUPHHK-HA dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya
		3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Sedang	Realisasi penataan batas kawasan lindung PT Diadyani Timber adalah sebesar 354,87 km atau sekitar 56,30%% dari panjang seluruh kawasan lindung (630,29km).
		3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Luas tutupan kawasan lindung yang masih berhutan yang terdiri dari hutan primer, hutan sekunder dan hutan mangrove lebih dai 80%
		3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat bukti pengakuan keberadaan kawasan lindung dari para pihak, yaitu : dari sebagian masyarakat desa di sekitar PT Diadyani Timber.
		3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	Dalam uraian di prosedur, kegiatan pengamanan untuk seleuruh jenis gangguan diterangkan secara umum belum merinci kegiatan yang perlu dilakukan baik pencegahan maupun penanggulangannya
		3.2.2. Sarana prasarana	Sedang	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perlindungan gangguan hutan		ketentuan (minimal 50%).
		3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).
		3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat Pemanfaatan hutan	3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
		3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai (kurang dari 50%) dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik.
		3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).
		3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%)
		3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang diimplementasikan minimal 50%.
		3.3.6.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Dampak terhadap tanah dan air		terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku	Sedang	Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).
		3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%)
	3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan Terancam punah dan endemik	3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
		3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi
		3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
		3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).
		3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik serta ada upaya untuk penanggulangannya.
SOSIAL	4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
		4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.
		4.1.3. Tersedia mekanisme	Baik	PT Diadyani Timber memiliki mekanisme mengenai pengakuan

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH		hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas.
		4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.
		4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik
	4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan	Sedang	Tersedia sebagian (minimal 50%) dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku
		4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
		4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian
		4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat	Sedang	PT Diadyani Timber memiliki bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab social seperti fee produksi, rencana realisasi kelola social, kontribusi lainnya dan kesehatan masayarakat, namun baru mencapai 50%

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dalam pengelolaan SDH		
		4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	Baik	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas (minimal 50%).
		4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
		4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas (minimal 50%).
		4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin
		4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Diadyani Timber memiliki bukti dokumen pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak seperti Laporan realisasi kelola sosial/community development, Berita Acara serah terima bantuan dan kuitansi pembayaran, PBB, PSDH, DR.
	4.4. Keberadaan	4.4.1. Tersedianya mekanisme	Baik	Tersedia Prosedur Standar Operasional (PSO) Penyelesaian

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	mekanisme resolusi konflik yang handal	resolusi konflik		Konflik Dengan Masyarakat (No.: SOS-4 Tanggal 1 November 2019 ). Terdapat Prosedur Standar Operasional (PSO) Pemetaan dan Resolusi Konflik No SOS-07 Tanggal 1 November 2019. Disahkan General Manager perencanaan & pembinaan Hutan
		4.4.2. Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap (minimal 50%).
		4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik
		4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Diadyani Timber telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
		4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Diadyani Timber telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi
		4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian (minimal 50%) diimplementasikan
		4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	Sedang	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian (minimal 50%) diimplementasikan.

### Verifikasi Legalitas Kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1	K.1.1	1.1.1	a.	Memenuhi	PT. Diadyani Timber mendapatkan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam melalui SK Menteri Kehutanan No. SK.292/Menhut-II/2009, seluas ± 205.160 ha di dilampiri Peta Areal Kerja skala 1 : 100.000.
			b.	Memenuhi	PT Diadyani Timber telah membayar IUPHHK sesuai dengan SPP Nomor: S.601/VI-BIKPHH/2009, tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp.7.161.525.000,00 yang dibayar secara mengangsur sebanyak 5 (lima) kali setoran
			c.	Tidak Diterapkan	Tidak ada ijin lain yang sah diluar IUPHHK namun ada penggunaan kawasan berupa jalan provinsi/ kabupaten merupakan “given” tidak termasuk penggunaan ijin pinjam pakai kawasan untuk kegiatan komersil, verifier ini not applicable.
P.2	K.2.1	2.1.1	a.	Memenuhi	RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020-2029 PT. PT Diadyani Timber, disetujui dengan SK MenLHK No. SK.146/VI-BPHA/2011 tanggal 27 Oktober 2011. Untuk RKT 2019-2020 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua
			b.	Memenuhi	PT Diadyani Timber memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung dan telah dilakukan kegiatan penandaan batasnya dilapangan.
			c.	Memenuhi	Terdapat peta kerja yang menggambarkan Blok tebangan tahunan yang telah disetujui berupa blok/petak tebangan disahkan (dicap). Terdapat penandaan batas blok dan petak tebangan sesuai dengan posisi blok tebangan didalam peta kerja.
	K.2.2	2.2.1	a.	Memenuhi	PT Diadyani Timber telah memiliki dokumen perencanaan jangka panjang 10 tahunan yang terdiri dari RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2010 – 2019 dan RKUPHHK Berbasis IHMB Periode tahun 2020 – 2029. Dokumen telah mendapatkan persetujuan dan dilampiri dengan dokumen hasil IHMB
b.			Tidak Diterapkan	Dokumen RKT dan RKT bahwa PT Diadyani Timber menerapkan sistem silfikutur TPTI, tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan HTI	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.3	K.3.1	3.1.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen LHP yang diterbitkan untuk periode Nopember 2019 – Nopember 2020 yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang yaitu Korneles Anaktototy No. Reg00345-15/PKB-R/XXXII/2020</li> <li>- Uji Petik terhadap fisik kayu di TPK Hutan/Logpond dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian jenis</li> <li>- Nomor batang kayu yang terdaftar di LHP dapat ditemukan di lapangan pada tunggak.</li> </ul>
		3.1.2		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu yang diangkut dari TPK Hutan/Logpond ke tujuan pengiriman kayu dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.</li> <li>- Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait</li> </ul>
		3.1.3	a.	Memenuhi	Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu yang diterapkan PT Diadyani Timber pada tunggak dan log berupa Label Barcode dan label ITSP telah sesuai dengan dokumen LHP dan bisa dilacak balak
			b.	Memenuhi	PT Diadyani Timber memiliki sistem penomoran yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.
		3.1.4		Memenuhi	Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan/Logpond Mapar ke tujuan TPK Industri tersedia lengkap dan sah dan dibuat oleh petugas yang berwenang
	K.3.2	3.2.1	a.	Memenuhi	Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan secara online melalui aplikasi SIPUHH untuk PSDH dan DR berdasarkan dokumen LHP yang diterbitkan sesuai dengan kelompok jenis, volume dan tarif.
			b.	Memenuhi	PT Diadyani Timber telah membayar kewajiban untuk PSDH dan DR berupa Bukti Penerimaan Negara telah sesuai dengan dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian Lembaga atas PSDH dan DR yang diterbitkan SIPNBP-SIMPONI
			c.	Memenuhi	Pembayaran DR dan/atau PSDH oleh PT Diadyani Timber telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	K.3.3	3.3.1		Memenuhi	Dokumen Manifest Domestik Perdagangan Antarpulau Pemiik Barang diterbitkan menyertai dokumen SKSHHK tujuan TPK Industri sebagai pengganti dokumen PKAPT
		3.3.2		Memenuhi	Setiap kapal pengangkut kayu dari TPK Antara/Logpond PT Diadyani Timber ke TPK tujuan Industri adalah kapal berbendera Indonesia
	K.3.4	3.4.1		Memenuhi	Implementasi penandaan V-Legal yang dilakukan oleh Pt Diadyani Timber antara lain 1. Tanda V-legal di barcode di Tunggak lokasi Petak Tebangan 2. Tanda V-Legal di barcode di log yang berada di TPK Antara/Logpond Mapar 3. Tanda V-legal pada dokumen angkutan kayu SKSHHK
P.4	K.4.1	4.1.1		Memenuhi	PT Diadyani Timber memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan
		4.1.2	a.	Memenuhi	Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan PT Diadyani Timber yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Penilai Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 21/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 15 Februari 1996. Dokumen RKL-RPL disusun mengacu pada dokumen AMDAL sesuai dengan Dampak Penting
			b.	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan, dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi.
P.5	K.5.1	5.1.1	a.	Memenuhi	PT Diadyani Timber memiliki Prosedur Standar Operasional K3, Dokumen P2K3 telah disahkan Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Papua No. KEP.15/BL UPTD WASNAKER/P2K3, tanggal 29 Oktober 2019, dengan sekretaris P2K3 sdr. Yana Saharina (Ahli K3 Umum).
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
			c.	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	K.5.2	5.2.1		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
		5.2.2		Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan kepala Tenaga Kerja Kota Jayapura Nomor 560/872 tanggal 06 Nopember 2020 dengan Masa berlaku Peraturan Perusahaan dari tanggal 06 Nopember 2020 s/d 5 Nopember 2022. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak hak pekerja yang tertuang dalam psal kesejahteraan dan jaminan sosial bagi karyawannya.
		5.2.3		Memenuhi	Jumlah karyawan PT Diadyani Timber 92 orang (53 orang bulanan, 18 orang borongan dan 21 orang harian), tidak ada yang berumur kurang dari 18 tahun.

# Sertifikat

**Pedoman & Standar**

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelengkapan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legalitas FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat 824 407 180002

**Pemilik Sertifikat:**

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

**Pemegang PBPH : PT DIADYANI TIMBER**

Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Kantor Pusat :

Jl. Arar, Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH):

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.638/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 jo SK. 202/Wenhut-II/2009 tanggal 18 Mei 2009.

**Ruang Lingkup:**

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas asal ± 205.160 ha di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Terbukti telah memenuhi Standar Penilaian PHPL sesuai :

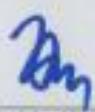
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 1 tentang Pedoman dan Standar PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan; dan Lampiran 1.2 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA, dengan nilai akhir kinerja berpredikat **SEDANG**.

**Masa Berlaku:**

Sertifikat berlaku dari 01-12-2017 sampai 30-11-2023.

Rev.01

Jakarta, 21 Februari 2022

  
PT TÜV Rheinland Indonesia  
Menara Karya 10<sup>th</sup> Fl. J. H. R. Rasuna Said  
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta